

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Bambang Waluyo, (2022), Penegakan hukum di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

Fodhi, dkk., (2024), Pentingnya Pemisahan Kekuasaan dalam Mempertahankan Pemerintahan yang Seimbang, Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial, Yogyakarta.

G.H.S. Lumban Tobing, (1999), Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta.
Haposan Siallagan, (2016), Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia, Sosio Humaniora, Bandung.

I. Setiawan, (2024), Pengawasan Pemerintahan dalam Ulasan Teori dan Praktek, CV. Rtujuh Media Printing, Bandung.

Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, (2022), Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

R.S. Tarigan, (2024), Konstitusi dan Kekuasaan: Studi Kasus dalam Hukum Tata Negara, Ruang Karya Bersama, Medan.

Soerjono Soekanto, (2007), Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.

Supriadi, (2023), Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

Wahyu Hidayat dan Anas Lutfi, (2025), Implementasi Kode Etik Notaris di Wilayah Tangerang Selatan, Binamulia Hukum, Tangerang.

Yudhanegara, dkk., (2024), Pengantar Filsafat Hukum: Sebuah Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Ilmu Hukum, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Surabaya.

Zainuddin Ali, (2014), Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

B. JURNAL

Annisa Safira. Kepatuhan Terhadap Kode Etik Sebagai Parameter Notaris untuk Mencegah Terjadinya Tindak Pidana. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP), Yogyakarta, Vol. 5, No. 3, 2025.

Safira, Annisa, (2025), Kepatuhan Terhadap Kode Etik Sebagai Parameter

- Notaris untuk Mencegah Terjadinya Tindak Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, Yogyakarta, Vol. 5, No. 3.
<https://dinastirev.org/JIHHP/article/view/3625>
- Aryani, R. dan Chrisbiantoro, C., (2024), *Dinamika Pengawasan Administrasi Negara Dalam Sistem Hukum Indonesia*, IUS FACTI: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Jakarta, Vol. 3, No. 1.
<https://ejurnal.ubk.ac.id/index.php/iusfacti/article/view/516>
- Betty Ivana Prasetyawati dan Paramita Prananingtyas, (2022), *Peran Kode Etik Notaris Dalam Membangun Integritas Notaris di Era 4.0*, Notarius, Semarang, Vol. 15, No. 1.
<https://doi.org/10.14710/nts.v15i1.46043>
- Bimo Otik Fajar Nugroho, (2024), *Kedudukan Hukum Akta Notaris Yang Mencantumkan Klausula Eksonerasi*, Tesis Magister, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.
<https://repository.unissula.ac.id/35275/>
- Busroh, dkk., (2024), *Harmonisasi Regulasi di Indonesia: Simplikasi dan Sinkronisasi untuk Peningkatan Efektivitas Hukum*, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Jakarta, Vol. 5, No. 1.
<https://doi.org/10.22225/juinhum.5.1.7997.699-711>
- Desela Sahra Annisa Rangkuti, (2022), *Pelaksanaan Jabatan Notaris Yang Mendapat Kewenangan Dari Negara Membuat Alat Bukti Autentik*, *Jurnal Kertha Semaya*, Denpasar, Vol. 1, No. 5.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/84989>
- Diniyosa Arteriovani Tinindra, (2024), *Perlindungan Hukum Terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Atas Sengketa Kepemilikan Tanah di Pengadilan*, Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.
<https://repository.unissula.ac.id/40203/1/>
- Haposan Siallagan, (2016), *Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia, Sosio Humaniora*, Bandung, Vol. 18, No. 2.
<https://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/9947>
- Hariss, A. dan Fauzia, N., (2015), *Peranan Majelis Pengawas Daerah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Notaris Di Kota Jambi*, *Jurnal Lex Specialis*, Jambi, Vol. 1, No. 22.
<https://www.neliti.com/publications/145549/>
- Herdiansah, A.G., (2016), *Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Menopang Pembangunan di Indonesia*, *Sosioglobal*, Jakarta, Vol. 1, No. 1.

<https://journal.unpas.ac.id/index.php/sosioglobal/article/view/2227>

Hilda Sophia Wiradiredja, (2015), Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Didasarkan Pada Keterangan Palsu, Jurnal Wawasan Yuridika, Bandung, Vol. 32, No. 1.

<https://journal.uib.ac.id/index.php/wawasan/article/view/341>

I. Ketut Tjukup, dkk., (2016), Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata, Acta Comitatus, Denpasar, Vol. 2, No. 1.

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/actacomitas/article/view/24902>

Kurnia, Y.R., (2024), Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Tantangan Demokrasi Dalam Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila di Indonesia, INNOVATIVE: Journal of Social Science Research, Malang, Vol. 4, No. 4.

<https://innovativejournal.unsika.ac.id/index.php/innovative/article/view/457>

Laia, P. dan Yusuf, H., (2024), Regulasi Tindak Pidana Ekonomi Dalam Kasus Perbankan Penyalahgunaan Wewenang, Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik, Jakarta, Vol. 2, No. 1.

<https://journal.unair.ac.id/KHUB/article/view/17823>

Latifah, (2021), Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelanggaran Kode Etik Notaris, Officium Notarium, Bandung, Vol. 1, No. 1.

<https://journal.uin.ac.id/JON/article/view/18886/0>

Malau, (2023), Tinjauan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023, AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Yogyakarta, Vol. 5, No. 1.

<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2815>

Marisco A. Umbas, (2013), Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Tugas Dan Fungsi Notaris, Lex Privatum, Manado, Vol. 1, No. 4.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/1587>

Milenia Ayu Habsari, (2023), Efektifitas Pelaksanaan Pengawasan Majelis Pengawas Daerah (MPND) Terhadap Jabatan Notaris di Kabupaten Semarang, Tesis Magister, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.

<https://repository.unissula.ac.id/34567/>

Novatiani, dkk., (2019), Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah, Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis, Bandung, Vol. 10, No. 1.

<https://journal.unpas.ac.id/index.php/jimb/article/view/2722>

- Oemar Moechthar, (2017), Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta, Airlangga University Press, Surabaya.
<https://repository.unair.ac.id/73292/>
- Prabawa, (2017), Analisis Yuridis Tentang Hak Ingkar Notaris Dalam Pemeriksaan Menurut UUN dan Kode Etik Notaris, Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan, Denpasar, Vol. 2, No. 1.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/actacomitas/article/view/34905>
- Pramono, D., (2015), Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia, Lex Jurnalica, Jakarta, Vol. 1, No. 1.
<https://journal.untar.ac.id/index.php/lexjurnalica/article/view/56>
- Prasojo, E., (2004), People and Society Empowerment: Perspektif Membangun Partisipasi Publik, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, Jakarta, Vol. 4, No. 2.
<https://journal.ui.ac.id/index.php/jiap/article/view/1840>
- Rachmadika, dkk., (2024), Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Dalam Menegakkan Negara Hukum yang Demokratis, INNOVATIVE: Journal of Social Science Research, Malang, Vol. 4, No. 3.
<https://innovativejournal.unsika.ac.id/index.php/innovative/article/view/445>
- Rakhmani, F., (2013), Kepatuhan Remaja Dalam Berlalu Lintas, Sociodev, Bandung, Vol. 2, No. 1.
<https://ejournal.upi.edu/index.php/sociodev/article/view/412>
- Ria Trisnomurti, (2017), Tugas dan Fungsi Majelis Pengawas Daerah Dalam Menyelenggarakan Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penjatuhan Sanksi Terhadap Notaris, NOTARIIL: Jurnal Kenotariatan, Surabaya, Vol. 2, No. 2.
<https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/notariil/article/view/3122>
- Rio Cahya Nandika, (2021), Penjatuhan Sanksi Bagi Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Dengan Ancaman Pidana Penjara Lima Tahun atau Lebih, Indonesian Notary, Jakarta, Vol. 3, No. 4.
<https://journal.undip.ac.id/index.php/indonesiannotary/article/view/5213>
- Sanyoto, S., (2008), Penegakan Hukum di Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum, Purwokerto, Vol. 8, No. 3.
<https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/jdh/article/view/187>
- M.T. Todingrara, (2024), Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Dalam Perspektif Restorative Justice, Mandub: Jurnal

Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, Makassar, Vol. 2, No. 1.
<https://journal.unhas.ac.id/index.php/mandub/article/view/28991>

H.D.L. Toruan, (2020), Legalitas Keberadaan Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Jakarta, Vol. 20, No. 3.
<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/1394>

Wahyu Hidayat dan Anas Lutfi, (2025), Implementasi Kode Etik Notaris di Wilayah Tangerang Selatan, Binamulia Hukum, Tangerang, Vol. 14, No. 1.
<https://doi.org/10.37893/jbh.v14i1.974>

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris sebagai aturan pelaksanaannya

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

D. ARTIKEL

Ikatan Notaris Indonesia, Perubahan Kode Etik Notaris Banten, 29-30 Mei 2015, <https://ini.id/uploads/images/image750x5bd7a3727eccd.pdf>, diakses tanggal 03 Juni 2025.